



*Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang*



# 2020

## LKPJ

### LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN



## KATA PENGANTAR


Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Disamping itu Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan informasi dalam upaya pencapaian target sasaran program dan kegiatan di Unit Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Saanin Padang,

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dibuat sebagai pertanggung jawaban hasil kegiatan dalam rangka upaya peningkatan kesehatan jiwa. Amin.

Padang, Januari 2021

Plt. Direktur

  
**dr. Aklima, MPH**  
Pembina TK.I

NIP. 19680203 200212 2 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN RS.JIWA PROF.HB.SAANIN PADANG.....	1
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH RS.JIWA PROF.HB.SAANIN PADANG.....	19
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	19
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.....	19
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran.....	34
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.....	37
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	38
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.....	39
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD.....	39
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ.....	39
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi.....	40
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA.....	40
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	42
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya.....	42
2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya.....	42
3.2. HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAANTUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	
1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya.....	42
2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	
BAB IV PENUTUP.....	43

# BAB I.

## DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN RS.JIWAPROF.HB.SAANIN PADANG

### A. Sejarah Singkat Rumah Sakit Jiwa

Pada tahun 1932 di Padang terdapat dua tempat penampungan orang sakit jiwa. Lokasi pertama dibelakang Rumah Sakit Tentara di Parak Pisang (Sekarang Rumah Sakit Tentara Reksodiwiryono) disebut sebagai *Doorganghuis voor Krankzinnigen*, dan ini merupakan bagian *Militaire Hospital* dan lokasi kedua ditempat RSJ sekarang, disebut sebagai Koloni Orang Sakit Djiwa (KOSD) Ulu Gadut. Di Ulu Gadut ini orang sakit jiwa melakukan kegiatan pertanian (sawah, ladang dan perkebunan). Setelah diresmikan berdiri pada tahun 1932 disebut Rumah Sakit Jiwa Parak Pisang, dan Ulu Gadut adalah tempat Koloni Orang Sakit Djiwa.

Pada zaman Revolusi 1945 terjadi pengungsian orang sakit jiwa secara keseluruhan dari Parak Pisang ke KOSD Ulu Gadut karena situasi semakin tidak aman. Pada 21 Januari 1947, waktu agresi Belanda terjadi lagi evakuasi/pengungsian karena situasi tidak aman lagi dari Ulu Gadut ke Sawah Lunto, menumpang dan bergabung dengan RSU Sawah Lunto (Pimpinan RSU waktu itu Dr.H.Hasan Basri Sa`anin Dt.Tan Pariaman) kemudian bernama Rumah Perawatan Sakit Jiwa (RPSD). Pada tahun 1954 dilakukan pembangunan kembali serta pemugaran bangsal-bangsal di Ulu Gadut dan pasien dikembalikan secara bertahap, dan KOSD diubah namanya menjadi Rumah Sakit Jiwa Ulu Gadut.

Sejak tahun 1961 statusnya diubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Pusat Ulu Gadut Padang ( kapasitas 110 tempat tidur) dan berakhir sampai tahun 2000. Berdasarkan SK Menkes-Kesos RI No 1732/Menkes-Kesos/2000 tanggal 12 Desember 2000, berubah lagi menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr.HB.Sa`anin Padang sampai sekarang.

Kemudian adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka RSJ menjadi UPTD Provinsi Sumatera Barat, sehingga tugas dan tanggung jawab berada dibawah Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Tahun 1978 - 2003 dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan RSJ mengacu pada SK Menkes RI No.135/Menkes/SK/IV/78 tanggal 28 April 1978 tentang SOTK RS Jiwa. Tahun 2003 - 2010 adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 tahun 2003 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, Tahun 2010 terbit Perda No. 7 dan Pergub No.6 Tahun 2011 tentang SOTK RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

## **B. DASAR HUKUM**

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan klasifikasi Kelas "B" dan kapasitas 273 Tempat Tidur, yang aturan pokok operasionalnya mengacu pada:

1. UU .Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. UU Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. UU.Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. UU Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. PP. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. PP Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.
8. PP. Nomor : 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
10. Keppres Nomor : 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan RSUD,
11. Kepmendagri Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja RS Daerah;

12. Permendagri Nomor : 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
13. Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Permendagri Nomor : 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Perubahan atas Permendagri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
16. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 7 Tahun 2010, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 6 Tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
18. Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Jasa Layanan Kesehatan Pada BLUD RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang.

## **C. GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Provinsi Sumatera Barat terletak antara  $0^{\circ} 54'$  Lintang Utara dan  $3^{\circ} 30'$  Lintang Selatan serta  $98^{\circ}36'$  dan  $101^{\circ}53'$  Bujur Timur, tercatat memiliki luas daerah sekitar 42,2 ribu  $\text{km}^2$  atau 2,17 % dari luas Republik Indonesia, Letak Geografis Sumatera Barat berada pada garis khatulistiwa (garis lintang  $0^{\circ}$ ).

Provinsi Sumatera Barat mempunyai wilayah kerja administratif terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota yang terbagi dalam 152 kecamatan dan 546 nagari serta 336 kelurahan.

## 2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan KB sebanyak 5.542.994 jiwa. "Dengan luas provinsi Sumatra Barat sekitar 42.125 kilometer persegi "Jumlah itu terdiri atas 2.791.543 laki-laki dan 2.751.451 perempuan, sedangkan sebaran penduduk Sumbar tercatat 73,10 persen berada di kabupaten dan 26,90 persen berada di kota,".Untuk Daerah Kota Padang dengan luas wilayah sebesar 686 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 Kecamatan dan Jumlah Penduduk ± sebanyak 907.104 jiwa.

## 4. Profil Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang.

### a) Keadaan Rumah Sakit Jiwa

- 1) Nama Rumah Sakit : RS. Jiwa Prof. H.B. Saanin Padang
- 2) Kelas Rumah Sakit : “ B “
- 3) Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar
- 4) Alamat : Jl. Raya Ulu Gadut
- 5) Kecamatan : P a u h
- 6) Kabupaten/ Kota : P a d a n g
- 7) Provinsi : Sumatera Barat
- 8) No. Telp / Fax. : (0751) 72001 / (0751) 71379
- E-mail : [rsjhbsaanin@yahoo.co.id](mailto:rsjhbsaanin@yahoo.co.id)
- Web : [rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id](http://rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id)
- 9) Jumlah Tempat Tidur : 273 TT
- 10) Jumlah Bangsal : 12 (Dua Belas) Unit + 1 Instalasi Napza

terdiri dari :

- Anggrek (VIP & Kelas I) = 8 tt
- Ruang Layanan Non Kekhususan  
(Kelas I, II & III) = 15 tt
- Flamboyan (Kelas II) = 25 tt

- Cendrawasih ( Kelas III )	= 40 tt
- Melati ( Kelas III )	= 35 tt
- Merpati ( Kelas III )	= 40 tt
- Nuri (Kelas III )	= 35 tt
- Dahlia (Kelas III)	= 0 tt
- Gelatik (HCU Jiwa)	= 13 tt
- UPIP (ICU Jiwa)	= 8 tt
- Instalasi Napza (Kelas III)	= 20 tt
- Teratai (Klas I,II,III)	= 12 tt
- Anrem (Klas I,II,III)	= 10 tt
- Mawar (Non Kelas)	= 12 tt

11) Sarana dan Prasarana :

Luas Tanah	: 93.609 m <sup>2</sup>
Luas Bangunan	: 19.680 m <sup>2</sup>
Areal Parkir	: 1.742,5 m <sup>2</sup>
Taman	: 3.227 m <sup>2</sup>
Fasilitas Air	: Sumur Artesis dan PDAM
Fasilitas Listrik	: PLN dan Genset
Fasilitas Air Limbah	: IPAL 1 Unit

**b) Ketenagaan : Jenis dan Jumlah Tenaga per Desember 2020**

<b>I</b>	<b>Jabatan struktural</b>	<b>PNS</b>	<b>Non PNS</b>	<b>PTT</b>	<b>Reveral</b>	<b>Ket</b>
1	Direktur	-				
2	Wadir Direktur	2	0	0	0	
3	Ka.Bagian/Ka.Bidang	5	0	0	0	
4	Kasie/Kasubag	11	0	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>				
<b>II</b>	<b>Jabatan fungsional</b>					
1	Dokter Spesialis	0	0	0	0	
2	Dokter Spesialis Jiwa	3	2	0	3	
3	Dokter Subspesialis Jiwa	0	0	0	1	
4	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi	0	0	0	1	
5	Dokter spesialis Neurologi	1	0	0	0	
6	Dokter spesialis anak	1	0	0	0	
7	Dokter Spesialis penyakit dalam	1	0	0	0	
8	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	0	0	0	
9	Dokter Spesialis Radiologi	0	0	0	1	
10	Dokter umum	9	1	0	0	
11	Dokter gigi	2	0	0	0	
12	Psikolog klinis	3	0	0	0	
13	Apoteker	4	3	0	0	
14	Asisten apoteker	9	2	0	0	
15	Perawat	98	45	0	0	
16	Perawat gigi	2	0	0	0	
17	Fisioterapis	1	0	0	0	
	Speechs Terapy	0	0	0	0	
	Okupasi Terapis	0	1	0	0	
18	Sanitarian	1	1	0	0	
19	Pranata Labor Kesehatan	7	2	0	0	
20	Penata Rontgen	1	0	0	0	
21	Rekam medis	6	3	0	0	
22	Teknis elektromedik	2	0	0	0	
23	Pekerja sosial	3	0	0	0	
24	Nutrisionis	5	0	0	0	
25	Pranata Komputer	1	2	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>161</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	
<b>III</b>	<b>Administrasi</b>					
	<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>43</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
<b>IV</b>	<b>Pendidikan</b>					
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Total</b>		<b>232</b>	<b>105</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	

**c. Indikator Kinerja Utama ( IKU )**

Untuk menilai hasil kinerja yang dicapai Rumah Sakit Jiwa mengacu pada Indikator tahun 2020 dibawah ini sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan RS
2. AVLOS
3. Persentase (%) Pasien Non Jiwa yang ditangani Spesialis
4. Tingkat Kemandirian Keuangan
5. Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

**d. Indikator Pelayanan Rumah Sakit Jiwa**

Untuk menilai hasil kegiatan yang dicapai Rumah Sakit Jiwa mengacu pada Indikator / tolok ukur sebagai berikut :

1. B O R ( % )
2. L O S ( hari )
3. B T O ( kali )
4. T O I ( kali )
5. N D R ( % )
6. G D R ( % )
7. Jumlah KJ Poliklinik (KP) ( KJ )
8. Jumlah Pasien Masuk ( orang )
9. Jumlah Pasien Dirawat ( orang )
10. Jumlah Hari Perawatan ( hari )
11. Jumlah Pasien Keluar/Pulang ( orang )
12. Jumlah Hari Perawatan Pasien Keluar/Pulang ( hari )

**D. Visi dan Misi serta Motto RSJ Prof. H.B. Sa`anin Padang**

**a. V i s i :**

*” Pusat Unggulan Kesehatan Jiwa di Indonesia.”*

**b. Misi**

1. Memberikan pelayanan Kesehatan Jiwa.
2. Meningkatkan kemandirian Rumah Sakit.

**c. Motto :**

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Saanin Padang “**Mengutamakan Pelayanan yang Ramah , Cepat , Tepat dan Terbaik**”

**d. Tujuan :**

1. Menurunnya Angka Kematian.
2. Terwujudnya Rumah Sakit yang Mandiri.

**e. Sasaran :**

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Prima
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima
3. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit
4. Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit

**f. Tugas pokok dan fungsi**

**1. Tugas pokok:**

RSJ Prof.HB Sa`anin Padang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

**2. Fungsi :**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. H.B. Saanin Padang mempunyai fungsi :

- a. Menyenggarakan Pelayanan Medis.
- b. Menyenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non medis
- c. Menyenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
- d. Menyenggarakan Pelayanan Rujukan
- e. Menyenggarakan Pendidikan dan Pelatihan
- f. Menyenggarakan penelitian dan Pengembangan
- g. Menyenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan

**g. Susunan Organisasi dan Tatalaksana Kerja**

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan rumah sakit pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang aturan pokok Operasionalnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 7 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 6 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa dikelompokkan sebagai berikut :

**1. Susunan Organisasi RS Jiwa Prof. Dr. HB. Saanin Padang terdiri dari:**

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur
- c. Bagian
- d. Bidang
- e. Komite
- f. SPI
- g. Instalasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**2. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi :**

**Direktur :**

- 1) Direktur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi promotif, pencegahan, pemulihan, rehabilitasi dan menyelenggarakan upaya rujukan di sektor kesehatan terutama dibidang kesehatan jiwa serta kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) Direktur mempunyai fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi, medis dan keperawatan;

- b) Penyelenggaraan urusan administrasi, medis dan keperawatan;
  - c) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang administrasi, medis dan keperawatan;
  - d) Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Direktur membawahi :
- a) Wakil Direktur Pelayanan Medis; dan
  - b) Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

**Wakil Direktur Pelayanan :**

- (1) Wadir Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam mengkoordinasi tugas bidang pelayanan medis, keperawatan, pelayanan penunjang dan tugas-tugas bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas Wadir Pelayanan mempunyai Fungsi :
  - (a) pengkoordinasian pengelolaan pelayanan rawat jalan;
  - (b) pengkoordinasian pengelolaan pelayanan rawat inap;
  - (c) pengkoordinasian pengelolaan keperawatan, etika dan profesi keperawatan;
  - (d) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Wadir Pelayanan membawahi;
  - (a) Bidang Pelayanan Medis;
  - (b) Bidang Pelayanan Keperawatan;
  - (c) Bidang Penunjang Medik;

**Bidang Pelayanan Medis :**

- 1) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi :
  - (a) penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis, elektromedik dan rehab medis;

- (b) pengelolaan dan penyajian data pelayanan medis, elektromedik dan rehab medis;
  - (c) pengelolaan dan pelayanan perawatan medik, elektromedik dan rehab medis;
  - (d) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Bidang Pelayanan Medis membawahi :
- a) Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medis;
  - b) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Fasilitasi Pelayanan Medis;

**Bidang Keperawatan :**

- 1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan asuhan, etika dan profesi keperawatan serta pengelolaan logistik keperawatan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
- a) pengkoordinasian, perencanaan, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi kegiatan bidang keperawatan.
  - b) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
- 3) Bidang Keperawatan membawahi :
- a) Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan;
  - b) Seksi Logistik Keperawatan;

**Bidang Penunjang Medik :**

- 1) Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Bidang Penunjang Medik sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi :
- a) penyusunan standar farmakologi RSJ;
  - b) pelaksanaan pelayanan Instalasi RSJ;
  - c) pengelolaan sarana dan prasarana RSJ;
  - d) pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya;

- 3) Bidang Penunjang Medik membawahi :
  - a) Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Penunjang Medik;
  - b) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Fasilitas Penunjang Medik;

**Wakil Direktur Umum dan Keuangan :**

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam mengkoordinasikan tugas bagian ketatausahaan, keuangan dan penelitian dan pengembangan dan tugas-tugas bagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - (a) pengkoordinasian perumusan program Pendidikan dan latihan serta Penelitian dan Pengembangan RSJ;
  - (b) Pengelolaan urusan kepegawaian, tatalaksana dan rumah tangga RSJ;
  - (c) Pengelolaan keuangan data dan informasi Rumah Sakit Khusus Daerah;
  - (d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi :
  - (a) Bidang Pendidikan dan Latihan serta Penelitian dan Pengembangan;
  - (b) Bagian Tata Usaha;
  - (c) Bagian Keuangan;

**Bidang Pendidikan dan Latihan serta Penelitian dan Pengembangan :**

- 1) Bidang Pendidikan dan Latihan serta Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan

administrasi dan teknis di bidang Pendidikan dan Latihan serta Penelitian dan Pengembangan;

- 2) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pendidikan dan Latihan serta Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi;
  - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Pendidikan dan latihan serta Penelitian dan Pengembangan;
  - b) Penyiapan bahan perumusan dibidang pendidikan dan latihan;
  - c) Penyiapan bahan perumusan di bidang penelitian dan pengembangan;
  - d) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Bidang Pendidikan dan Latihan serta Penelitian dan Pengembangan membawahi :
  - a) Seksi Pendidikan dan Latihan;
  - b) Seksi Penelitian dan Pengembangan.

**Bagian Tata Usaha :**

- 1) Bagian tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas sub bagian sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
  - b) pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
  - c) pengelolaan administrasi keuangan;
  - d) pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian data;
  - e) pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - f) pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya;

- 3) Bagian Tata Usaha membawahi :
  - a) Sub Bagian Umum, Aset dan Perlengkapan;
  - b) Sub Bagian Kepegawaian, Humas, Organisasi dan Hukum

**Bagian Keuangan :**

- 1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan RSJ;
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a) pelaksanaan administrasi akuntansi dan verifikasi;
  - b) pelaksanaan administrasi anggaran dan perbendaharaan;
  - c) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- 3) Bagian Keuangan membawahi :
  - a) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
  - b) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;

**Komite :**

- 1) Komite dibentuk dengan keputusan direktur untuk tujuan dan tugas tertentu;
- 2) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- 3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- 4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi;
- 5) Jumlah Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan;
- 6) Dalam melaksanakan tugas, komite dapat membentuk Sub.Komite dan atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan direktur.

**SPI :**

- 1) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur;
- 2) SPI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- 3) SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
- 4) Anggota SPI harus berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

**Instalasi :**

- 1) Instalasi adalah unit layanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian rumah sakit;
- 2) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan;
- 3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
- 4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis;

**TATA KERJA**

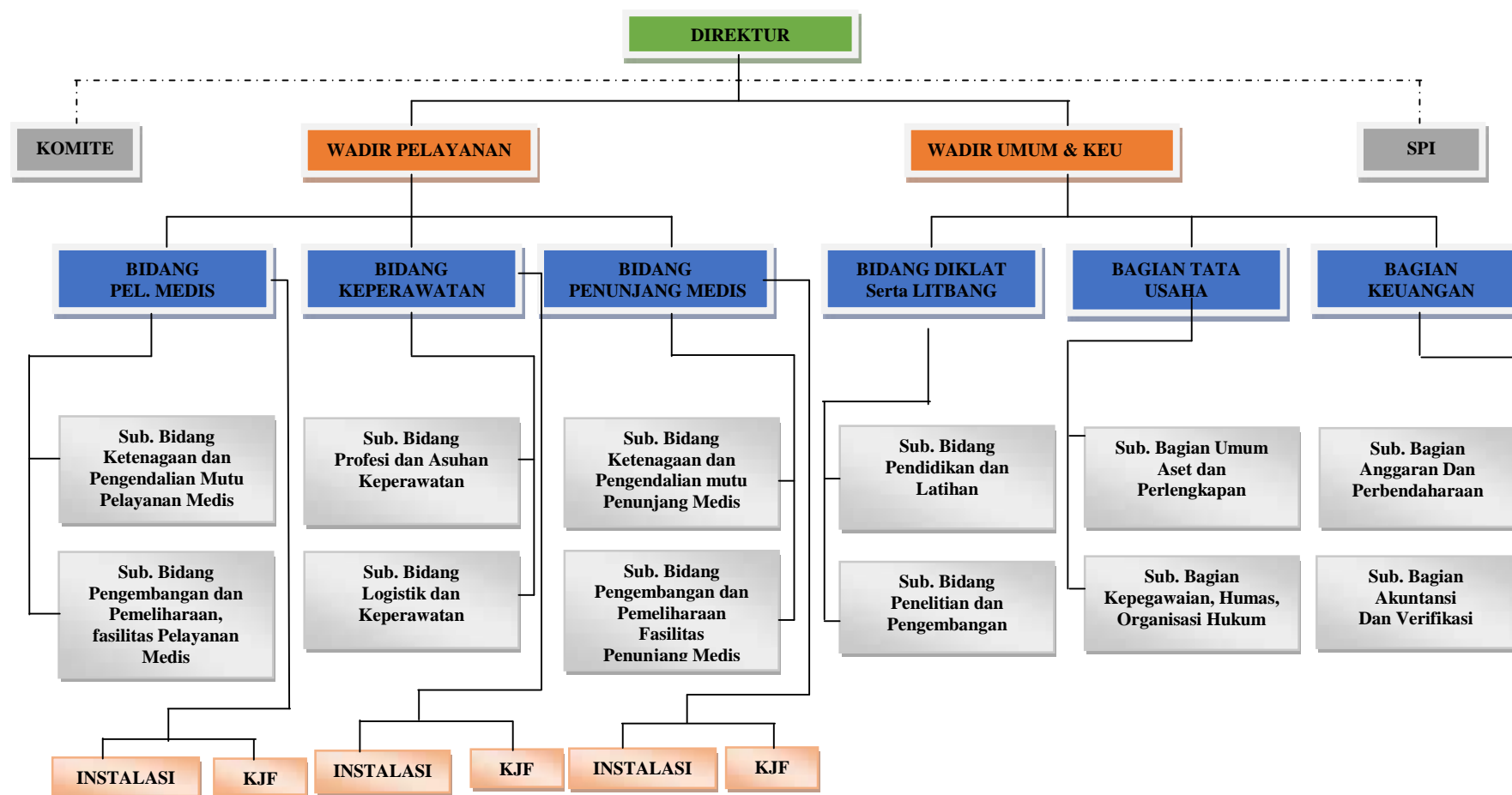
1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub.Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup RSJ Prof. Dr. HB. Saanin Padang menerapkan koordinasi, Integrasi,sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam menjalankan tugas, RSJ Prof. Dr. HB. Saanin Padang melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
3. RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan. Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dalam lingkungan satuan kerjanya.

**ESELONERING :**

Eselonering Jabatan Struktural pada RS Jiwa Prof. Dr. HB. Saanin Padang adalah sebagai berikut :

- a. Direktur, eselon II b;
- b. Wakil Direktur, eselon III a;
- c. Kepala Bagian / Bidang, eselon III b;
- d. Kepala Sub Bagian / Seksi, eselon IV a.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA PROF.DR. HB. SAANIN PADANG



### **E. Strategi dan Arah Kebijakan**

Dalam rangka memperoleh hasil pelayanan Rumah Sakit yang optimal, maka strategi yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan kinerja SDM dengan bimbingan teknis Bidang Pelayanan, Penunjang, Keperawatan dan Bagian Administrasi.
2. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
3. Peningkatan sarana gedung dan kantor sesuai kebutuhan.
4. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain
5. Peningkatan kesejahteraan pegawai

### **F. Prioritas**

1. Meningkatkan kompetensi tenaga medis, paramedis dan administrasi.
2. Meningkatkan standar kualitas dan kuantitas pelayanan kepada pasien
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa.
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.
5. Meningkatkan kinerja, prestasi kerja dan kedisiplinan karyawan.
6. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit yang baik.

## BAB II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG YANG DILAKSANAKAN RS.JIWA PROF.HB.SAANIN PADANG

### 2.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang, Pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.352.954.364,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.297.805.296,00 atau 92,49%, dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Tabel 2.1

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS.Paru/RS. Mata	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	93,84	104
		AvLos	42 Hari	26 hari	138
		Persentase Pasien Non Jiwa yang ditangani spesialis	85%	89,07	105
II	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kemandirian Keuangan	46%	47,96	104
		Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Nilai BB (76%)	BB (79,15)	104

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja tahun 2020 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat targetnya adalah 90%, realisasi 93,84% dan persentase 104%, meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu 86,07% dengan pencapaian 97%, Avlos (Average Length Of Stay) Standar RSJ < 42 Hari targetnya adalah 42 hari, realisasi 26 hari dan persentase capaian 138% menurun dari tahun sebelumnya, Persentase Pasien Non Jiwa

yang ditangani spesialis targetnya 85%, realisasi 89,07% dengan persentase 104%, terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) RS target 44%, realisasi 86,21% dengan persentase 187%, meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu 51,29% dan Nilai evaluasi SAKIP target BB, realisasi BB (75,22) dengan persentase capaian 98,97%.

### **1). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap seluruh layanan Rumah Sakit**

Kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan di RS.Jiwa Prof.HB Saanin Padang dengan 18 elemen indeks kepuasan yang sudah ditetapkan Kemenpan dapat diukur dengan melakukan survey kepuasan oleh Bidang Diklat dan Litbang RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang yang dilakukan rutin setiap tahunnya.

Survey indeks kepuasan masyarakat dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Untuk menjaga hasil survey tetap valid, pihak rumah sakit menyerahkan pelaksanaan survey kepada pihak yang independen dalam hal ini diluar RS. Pada tahun 2020 ini survey dilakukan oleh LPPM ( Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Andalas Padang.

Realisasi IKM tahun 2020 adalah 93,84%. Bila dibandingkan dengan target nilai IKM RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan (90%), maka dapat diketahui persentase capaian IKM tahun 2020 adalah sebesar 104%, ini berarti dalam skala penilaian **Sangat Baik**. Secara Nasional berdasarkan Permenpan & RB RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, nilai IKM RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang termasuk pada rentang nilai 88,31 – 100 dengan kategori **Sangat Baik**.

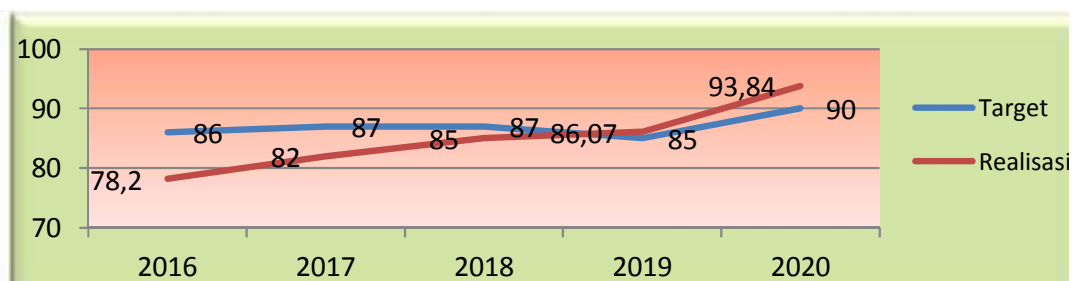
Pada tahun 2020 penilaian IKM dilakukan satu periode, yang dilakukan oleh tenaga independen (eksternal) dengan hasil rata rata 93,84 %.

Jika dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

**Tabel 2.2** **Pengukuran Indikator Kinerja:**  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	78,2	87	82	87	85	85	86,07	90	93,84

Trend Perkembangan Nilai IKM dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan bahwa nilai IKM tahun 2020 realisasinya meningkat dibandingkan Tahun 2019. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana RS, meningkatnya edukasi kepada pasien dan keluarga, meningkatnya proses pemberian pelayanan, meningkatnya kenyamanan dan keamanan pengunjung, baik di pelayanan rawat jalan, rawat inap dan IGD.

Pencapaian IKM tahun 2020 dengan kategori **Sangat Baik** sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh rumah sakit diantaranya:

- a) Peningkatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan khususnya yang meningkatkan pelayanan Publik. Dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 95.000.000 berasal dari dana RBA BLUD.
- b) Peningkatan sarana prasarana yang menunjang pelayanan dan pengembangan layanan RS sehingga dapat diakses lebih mudah oleh Masyarakat. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.278.500.881 berasal dari Belanja RBA BLUD dan Rp. 7.467.032.440 dari APBD.

- c) Pemberian informasi secara kontiniu kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung (*leaflet, barner, running Teks*, media cetak maupun elektronik). Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut Rp. 66.300.000,- dari dana RBA BLUD.
- d) Peningkatan pelayanan dengan menggunakan Tekhnologi Informasi sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Biaya dikeluarkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 230.180.000,- dari dana RBA BLUD.
- e) Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan menyediakan ruangan pengaduan dan memperbanyak kotak pengaduan, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhannya.

Sementara masih diperlukan perbaikan dan peningkatan tentang perilaku petugas dan sarana dan prasana pendukung pada poliklinik seperti :

- a) Kemudahan Persyaratan Pelayanan
- b) Kemudahan Prosedur Pelayanan
- c) Kerapian Petugas dalam memberikan pelayanan dengan memakai atribut yang lengkap
- d) Kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan
- e) Kesopanan dan keramahan satpam dalam memberikan pelayanan
- f) Lama waktu untuk meracik obat
- g) Pembangunan Sarana dan Prasarana di tempat layanan pasien rawat inap seperti : toilet umum untuk tamu dan penunjuk arah lokasi parkir tamu rawat inap
- h) Memperbaiki sarana pengaduan pelayanan kotak saran dan menyediakan pena dan kertas pengaduan
- i) Meletakkan papan informasi tentang jenis pelayanan pengaduan pada area yang mudah dibaca dan dilihat masyarakat.
- j) Jadwal pelayanan klinik dimulai tepat waktu
- k) Petugas farmasi memberikan informasi waktu penyelesaian obat kepada masyarakat

- l) Menambah loket layanan farmasi beserta petugasnya
- m) Memastikan jadwal visite dokter pada pasien rawat inap tepat waktu, sehingga tidak terlambat untuk melakukan layanan di klinik anak dan remaja, seperti klinik dewasa.

## 2). AvLOS

AvLOS (*Average Length of Stay*) atau angka rata-rata lama pasien dirawat adalah perbandingan jumlah lama pasien dirawat dengan jumlah pasien keluar baik hidup maupun mati. Dalam penilaian ini semakin kecil realisasi dari target yang telah ditetapkan maka dianggap pencapaian lebih baik.

$$AVLOS = \frac{\text{Jumlah Lama Pasien Dirawat}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup/Mati)}}$$

Adapun cara perhitungan capaiannya menggunakan Rumus :

$$AvLOS = \frac{2 \times \text{Target} - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

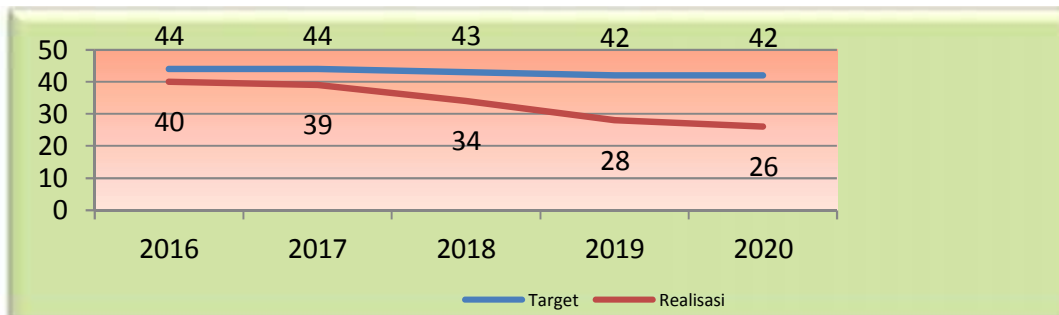
Realisasi AvLOS tahun 2020 adalah 26 Hari , Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 42 hari, maka dapat diketahui persentase capaian AvLOS tahun 2020 adalah sebesar 138%, ini berarti skala penilaiannya **Sangat Baik**. Sementara jika dibandingkan dengan target AvLOS yang ditetapkan Kemenkes untuk pasien jiwa sebesar 42 hari berarti capaian AvLOS pada tahun 2020 sudah dibawah target Nasional.

Bila dibandingkan dengan AvLOS tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel 2.3 dibawah ini:

**Tabel 2.3** **Pengukuran Indikator Kinerja:**  
AvLOS (*Average Length of Stay*)

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	AvLOS ( <i>Average Length of Stay</i> )	44	40	44	39	43	34	42	28	42	26

Trend Perkembangan AvLOS dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi AvLOS Tahun 2020 dibawah target. Hal ini berarti pencapaiannya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019. Pencapaian tahun ini (26 hari) bila dibandingkan dengan tahun 2019 (28 hari), terdapat selisih 2 hari. Capaian tersebut dibawah dengan Standar Depkes untuk RS Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang idealnya 42 hari, realisasi 26 hari sehingga terdapat selisih 2 hari dari target. Hal ini disebabkan karena:

- a) Adanya koordinasi antara RS dengan Dinas Sosial Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga pasien yang ditanggung Dinas Sosial yang sudah dinyatakan boleh pulang oleh Dokter, bisa di pulangkan ke alamat keluarganya. Biaya dikeluarkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 16.500.000 untuk pemulangan pasien dari dana RBA BLUD.
- b) Mengadakan pertemuan keluarga guna membantu dalam pemahaman keluarga untuk kebutuhan pasien pasca pulang.
- c) Melaksanakan *Clinical pathway* untuk 5 Diagnosa medis terbanyak yang membantu kendali mutu dan kendali biaya. Biaya untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 209.735.860,- untuk cetak rekam medis berasal dari dana RBA BLUD.

Untuk mempertahankan capaian tersebut RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang selalu melakukan upaya antara lain:

- a) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Sosial agar dapat menyiapkan tempat/panti/rumah singgah bagi pasien yang dinyatakan sudah dapat dipulangkan.

- b) Meningkatkan partisipasi keluarga dalam proses perawatan melalui pendidikan kesehatan kepada keluarga yang berkunjung ke Rumah Sakit.
- c) Menganggarkan kegiatan *dropping* pasien atau memulangkan pasien pada keluarganya terutama bagi keluarga miskin.
- d) Meningkatkan pelaksanaan Clinical Pathway menjadi 10 Diagnosa terbanyak untuk melakukan kendali mutu dan kendali biaya.

**ii. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima**

Tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima meliputi upaya kesehatan diluar psikiatri (Penyakit dalam, Syaraf, Anak, Gigi/Mulut dan Rehabilitasi Medik) baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh lapisan masyarakat dengan didukung sarana prasarana yang memadai, diwujudkan dengan 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya mutu pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima.

Sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis.

TUJUAN 1	SASARAN 1
Menurunnya Angka Kematian	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 2.4:

<b>Tabel 2.4</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pengukuran Kinerja Sasaran:</b> Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Spesialis Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa Prima</p>
------------------	---

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis	85%	89,07%	104%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, tabel 3.5 menunjukkan bahwa realisasi pelayanan kesehatan non jiwa yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa prima di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tahun 2020 adalah 104% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Dari 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran 2 (dua): hasilnya melebihi target yang telah ditetapkan. Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

#### 1) Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis

Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis adalah jumlah pasien non psikiatri (penyakit dalam, penyakit syaraf, anak, dan pelayanan gigi) yang ditangani oleh dokter spesialis dibanding dengan jumlah pasien non psikiatri yang datang berobat x 100.

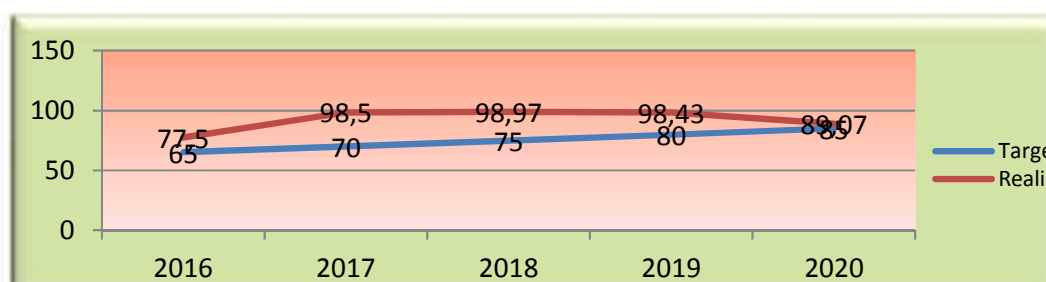
Realisasi Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun 2020 adalah 89,07%. Bila dibandingkan dengan target Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang yang telah ditetapkan (85%), ini berarti dalam skala penilaian **Sangat Baik**.

Jika dibandingkan dengan Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun sebelumnya dapat dilihat dari table 2.5 dibawah ini:

**Tabel 2.5** **Pengukuran Indikator Kinerja:**  
**Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis**

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis	65	77,5	70	98,5	75	98,9	80	98,43	85	89,07

Trend Perkembangan Persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan hasil persentase (%) pasien non jiwa yang ditangani spesialis tahun 2020 realisasinya menurun dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dari RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang untuk Pelayanan di Poliklinik dilakukan oleh dokter spesialis dan adanya pandemi Covid-19 yang membuat menurunnya kunjungan pasien ke RS. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2016-2021 yaitu sebesar 90%, pencapaian Tahun 2020 kurang dari target Renstra dengan selisih sebesar 0.93%.

### iii. Meningkatkan kemandirian Rumah Sakit

Tujuan Meningkatkan kemandirian Rumah Sakit menggambarkan kemampuan RS dalam melaksanakan tata kelola RS dan membiayai seluruh pengeluaran baik operasional maupun investasi dengan dana yang bersumber dari pendapatan RS, kemampuan dalam mengelola SDM dan tata kelola RS. Tujuan kedua dapat diukur dengan 2 sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit
- 2) Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit.

**a. Sasaran 1:**

Pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Tingkat kemandirian keuangan RS (TKK)

Tujuan 1	Sasaran 1
Terwujudnya Rumah Sakit yang Mandiri	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6	Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK)
-----------	--

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Tingkat Kemandirian Keuangan RS (TKK)	46%	47,96%	104%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1, tabel 2.6 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kemandirian keuangan di RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada Tahun 2020 sebesar 104% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

**1) Tingkat Kemandirian Keuangan RS (TKK)**

Tingkat Kemandirian Keuangan merupakan salah satu indikator kinerja keuangan rumah sakit. Indikator ini menggambarkan kemampuan RS membiayai seluruh biaya rumah sakit, dari pendapatan murni rumah sakit.

TKK adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan RS menutupi biaya (*Cost*) dibandingkan dengan penerimaan dari pendapatan pelayanan pasien (*Revenue*). TKK dihitung dari persentase perbandingan

antara total pendapatan dengan total biaya belanja rumah sakit dengan nilai idealnya diatas 40%.

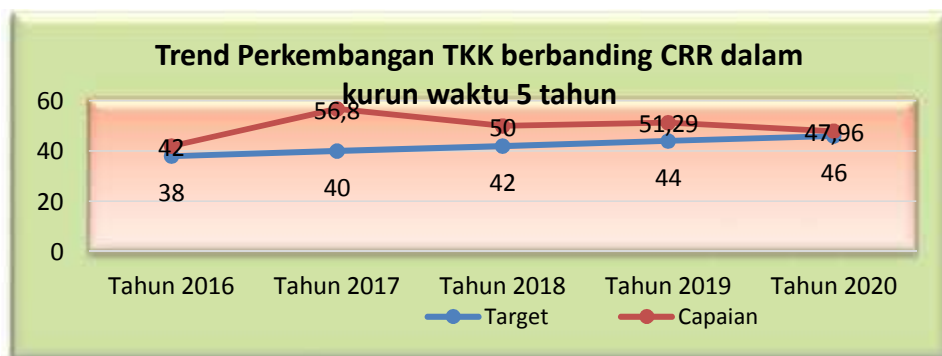
Realisasi TKK Tahun 2020 sebesar 47,96%, hal ini menunjukkan persentase capaian TKK Tahun 2020 adalah sebesar 104%. Dengan skala penilaian **Sangat Baik**. Jika dibandingkan dengan TKK secara nasional adalah minimal 40%, TKK RS Jiwa Prof HB Saanin sudah berada pada rentang diatas standar minimal Nasional.

TKK merupakan indikator yang baru diperhitungkan mulai tahun 2016, namun demikian pada laporan ini sebagai pembandingan tingkat capaian dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7** Pengukuran Indikator Kinerja:  
Persentase (%)TKK

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)	38	42	40	56,8	42	50	44	51,29	46	47,96

Trend Perkembangan TKK dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Grafik diatas menunjukkan bahwa TKK tahun 2020 capaiannya bertambah dari Tahun 2019. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala dalam klaim BPJS sehingga pendapatan Rumah Sakit tertunda. Selain itu terjadi penurunan jumlah

pasien rawat jalan disebabkan mulai berlakunya rujukan online berjenjang dimana pasien rawat jalan dirujuk dimulai dari RSUD kelas D,C,B dan A.

Pencapaian TKK tahun 2020 dengan kategori **Sangat Baik** didukung oleh Pendapatan RS, Belanja APBD dan Belanja BLUD, diantaranya :

1. Target pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 21.886.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.808.600.256,- dengan pencapaian 99,64%.
2. Belanja APBD dimana target belanja APBD sebesar Rp. 23.202.024.925,- terealisasi sebesar Rp. 22.573.980.218,- dengan persentase 97,29%. Kegiatannya diantaranya Belanja Tidak langsung (Gaji dan Tunjangan PNS), Belanja langsung (Pembangunan asrama diklat II, Pengembangan selasar RS, Pembangunan Gedung diklat, Pembangunan Rumah Dinas Eselon II, Pengadaan sarana perawatan bagi penderita akibat asap rokok (DBHCHT), Rehab Gedung instalasi radiologi, Rehab Gedung Instalasi Laundry).
3. Belanja BLUD target belanja Rp. 24.469.657.515,- realisasi Rp. 22.893.912.526,- dengan persentase capaian 93,56%, kegiatannya adalah peningkatan pelayanan BLUD RS.

**b. Sasaran 2: Meningkatkan Tata Kelola RS.**

Pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

Tujuan 1	Sasaran 1
Terwujudnya RS yang Mandiri	Meningkatnya Tata Kelola Rumah sakit

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel 2.8 sebagai berikut:

<b>Tabel 2.8</b>	<b>Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Tatakelola Rumah Sakit</b>
------------------	--

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	BB (76)	B (79,15)	104

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 tabel 2.8 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya tata kelola di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tahun 2020 berdasarkan Nilai SAKIP sebesar 104% dan dalam skala pengukuran kategori **Sangat Baik**.

Selanjutnya capaian indikator dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

## 2) Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja RS. Jiwa Prof.HB. Saanin Padang yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja keuangan organisasi. Bentuk akhir dari SAKIP adalah dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP.

Dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen: Komponen pertama adalah perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Komponen kedua adalah pengukuran kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran. Komponen ketiga adalah pelaporan kinerja yang terdiri dari pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Komponen ke empat adalah evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi dan komponen ke lima adalah pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan dan kinerja lainnya.

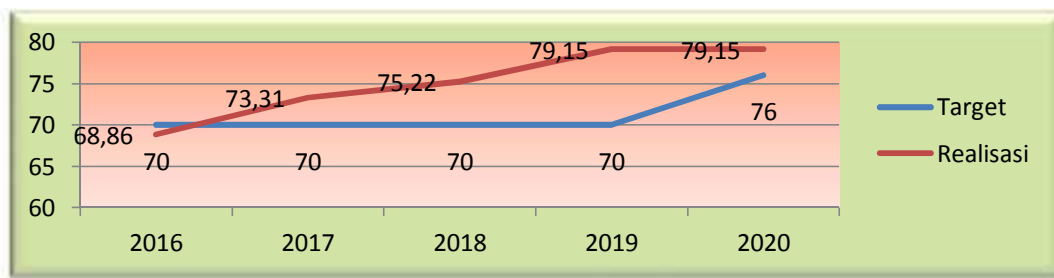
Realisasi SAKIP tahun 2020 merupakan hasil penilaian dari LAKIP Tahun 2020 dengan nilai adalah BB (79,15). Bila dibandingkan dengan target nilai LAKIP RS.Jiwa Prof.HB. Saanin Padang yang telah ditetapkan BB (76), maka dapat

diketahui persentase capaian nilai LAKIP Tahun 2020 adalah sebesar 104%, ini berarti dalam skala penilaian **Sangat Baik**. Realisasi nilai LAKIP tahun 2016 – 2020 dapat dilihat dari tabel 2.9 dibawah ini:

**Tabel 2.9** **Pengukuran Indikator Kinerja:**  
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

No	Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Evaluasi Sakip SKPD	70	68,86	70	73,31	70	75,22	70	75,22	76	79,15

Perkembangan Nilai LAKIP dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut.



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai LAKIP Tahun 2020 realisasinya masih sama dengan tahun 2019, berada pada kategori BB dengan nilai 79,15.

Pencapaian LAKIP pada tahun 2020 dengan kategori **Sangat Baik** sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit diantaranya:

- Melibatkan semua unsur bidang/ bagian untuk terlibat dalam perencanaan sehingga perencanaan menjadi suatu acuan yang disepakati bersama untuk dilaksanakan.
- Melakukan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk setiap triwulan sehingga dapat diantisipasi segala kendala dengan cepat.
- Melakukan pengukuran terhadap kinerja eselon III dan eselon IV.
- Melakukan pelaporan capaian kinerja melalui e-SAKIP.

Untuk peningkatan penilaian LAKIP dimasa yang akan datang diperlukan:

1. Pengembangan IT dalam pengukuran kinerja
2. Melakukan analisis efisiensi program kegiatan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun.
3. Melakukan Revisi Renstra sesuai perubahan Perundang-undangan.
4. Melakukan perbaikan case canding terhadap Kinerja eselon II ke Eselon III dan Eselon IV.

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.10

Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi
					(%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS.Paru/RS.Mata</b>	Permendagri 86 Tahun 2017	90%	80%	88,88	2.883.296.849	2.403.892.770	83,37
1	Pembangunan Asrama Diklat II		0%	0%	0	0	0	0
2	Pengembangan Selasar RS		100%	100%	100	400.000.000	309.492.544	77,37
3	Pembangunan Gedung Diklat		0%	0%	0	0	0	0
4	Pembangunan Rumah Dinas Eselon II		100%	100%	100	1.000.000.000	830.707.397	83,07

5	Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7/PMK.07/2020	100%	100%	100	386.668.346	343.296.537	88,78
6	Rehab Gedung Instalasi Radiologi (DAK)	Perpres RI No.88 Tahun 2019	100%	100%	100	572.510.000	496.317.295	86,69
7	Rehab Gedung Instalasi Laundry (DAK)		100%	100%	100	524.118.503	424.078.997	80,91
<b>II</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD</b>	Permendagri No.79 Tahun 2018						
	1. Avlos (Average Length Of Stay) Standar RSJ < 42 Hari		42 Hari	26 Hari	138			
	2. Respon Time IGD (<5 menit)		100%	100%	100			
	3. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		90%	93,84%	104			
	4. Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) RS		46%	47,96%	104			
1	Pelayanan BLUD		12 Bulan	12 Bulan	100	24.469.657.515	22.893.912.526	93,56

Berdasarkan tabel diatas RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tahun 2020 memiliki 2 Program dan 8 Kegiatan yang dimana 7 kegiatan dibawah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS.Jiwa/RS.Paru/RS.Mata dan 1 dibawah Program

Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS.Jiwa/RS.Paru/RS.Mata memiliki target anggaran 90% dan terealisasi 80% dengan pencapaian 88,88%, kegiatan dari program ini diantaranya adalah Pembangunan Asrama diklat II dan Pembangunan Gedung Diklat tidak jadi terlaksana karena *recoffusing* anggaran untuk penanganan pandemic covid-19, Pembangunan Selasar RS memiliki target kegiatan 100% dengan realisasi 100% sehingga pencapaiannya juga 100% sedangkan pencapaian keuangannya 77,37%. Selanjutnya adalah kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Eselon II yang memiliki target kegiatan 100% terealisasi 100% dengan pencapaian 100% sedangkan pencapaian keuangannya 83,07%. Selanjutnya adalah kegiatan Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT) memiliki target kegiatannya 100%, pencapaian 100% dengan pencapaian keuangannya 99,78%, kegiatan Rehab Gedung Instalasi Radiologi (DAK) memiliki target kegiatan 100% dan pencapaian juga 100% dengan pencapaian keuangannya 86,69% terakhir pada program ini adalah kegiatan Rehab Gedung Instalasi Laundry (DAK) dengan target kegiatan 100% terealisasi 100% dan pencapaian juga 100%. selanjutnya program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD yang memiliki kegiatan Pelayanan BLUD dengan target kegiatan 12 bulan terealisasi 12 bulan dengan pencapaian keuangan 93,56%.

**Tabel 2.11**  
**Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS.Paru/RS.Mata</b>	Tidak Ada Permasalahan	Nihil	Nihil
1	Pembangunan Asrama Diklat II	Tidak Ada Permasalahan	Nihil	Nihil
2	Pengembangan Selasar RS	Tidak Ada Permasalahan	Nihil	Nihil
3	Pembangunan Gedung Diklat	Tidak Ada Permasalahan	Nihil	Nihil

4	Pembangunan Rumah Dinas Eselon II	Tidak Ada Permasalahan	Nihil	Nihil
5	Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)	Tidak Ada Permasalahan	Nihil	Nihil
6	Rehab Gedung Instalasi Radiologi (DAK)	Tidak Ada Permasalahan	Nihil	Nihil
7	Rehab Gedung Instalasi Laundry (DAK)	Tidak Ada Permasalahan	Nihil	Nihil
<b>II</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD</b>	Tidak Ada Permasalahan	Nihil	Nihil
1	Pelayanan BLUD	Tidak Ada Permasalahan	Nihil	Nihil

Berdasarkan table diatas RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tahun 2020 tidak memiliki permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan karena semua program dan kegiatan yang dianggarkan teralisasi dengan baik.

### 3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

#### a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS.Jiwa/RS.Paru/RS.Mata, dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Pengembangan Selasar RS, dengan output kegiatan ini adalah 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 2) Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Eselon , dengan output kegiatan ini adalah 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 3) Kegiatan Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT) , dengan output kegiatan ini adalah 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 4) Kegiatan Rehab Gedung Instalasi Radiologi (DAK) , dengan output kegiatan ini adalah 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 5) Kegiatan Rehab Gedung Instalasi Laundry (DAK) , dengan output kegiatan ini adalah 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 5 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS.Jiwa/RS.Paru/RS.Mata dimana dari target anggaran adalah 90%

terrealisasi 80% dengan pencapaian 88,88% karena dari 7 kegiatan pada program ini ada 2 kegiatan yang dilakukan *recoffusing* anggaran yang dialikan untuk penanganan pandemi covid-19.

**b. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD:**

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD, dengan output kegiatan ini adalah 100% sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 1 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD dimana target anggarannya adalah 90% terealisasi 93,56% dengan pencapaian 103%.

**2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN**

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2020 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang, sebagaimana table berikut :

**Tabel 2.12**

**Kebijakan Strategis RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2020**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1			
<b>TIDAK ADA</b>			
2	Dst		

Berdasarkan tabel diatas RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tahun 2020 tidak memiliki kebijakan strategis atas masalah yang akan diselesaikan.

**2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA**

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 pada RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang, telah ditindaklanjuti

dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

**1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :**

**Tabel 2.13**

**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019**

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan tabel diatas RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tahun 2019 tidak mendapatkan rekomendasi dari DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

**2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ**

**Tabel 2.14**

**Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019**

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan tabel diatas RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tahun 2019 tidak mendapatkan rekomendasi Pansus LKPJ DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

### 3. Tindak Lanjut rekomensai Fraksi

Tabel 2.15

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan tabel diatas RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang pada tahun 2019 tidak mendapatkan rekomendasi Fraksi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

#### 2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

Tabel 2.16

#### Penghargaan yang Diraih Tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2020	Komisi Informasi Sumatera Barat	RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang	Hotel Grand Zuri Padang / 25 November 2020
2	Sertifikat Keikutsertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN –KIS)	BPJS Kesehatan	RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang	BPJS Kesehatan Jakarta / 1 Januari 2019 – 31 Desember 2020

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang mendapatkan penghargaan Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2020 dari Komisi Informasi Sumatera Barat (Lembaga Independen) tanggal 25

November 2020 di Hotel Grand Zuri Padang dan Sertifikat Keikutsertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) dari BPJS Kesehatan tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2020.

**BAB III.**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dalam hal ini tidak merupakan salah satu SKPD yang diberikan tanggung jawab untuk pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

## **BAB IV. PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan

Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

**LAMPIRAN**

## REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD TA. 2020

SKPD : RS JIWA Prof. HB. SAANIN PADANG

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET KUALITATIF		ANGGARAN TAHUN 2020	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	
							Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit / RS. Khusus / RS Mata</b>				<b>2.883.296.849</b>		<b>2.403.892.770</b>	<b>83,37</b>
1	Pembangunan Asrama Diklat II	Padang	100%	95%	-	0%	-	-
2	Pengembangan Selasar Rumah Sakit	Padang	100%	95%	400.000.000	100%	309.492.544	77,37
3	Pembangunan Gedung Diklat	Padang	100%	95%	-	0%	-	-
4	Pembangunan Rumah Dinas Eselon II	Padang	100%	95%	1.000.000.000	100%	830.707.397	83,07
5	Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)	Padang	100%	95%	386.668.346	100%	343.296.537	88,78
6	Rehab Gedung Instalasi Radiologi (DAK)	Padang	100%	95%	572.510.000	100%	496.317.295	86,69
7	Rehab Gedung Instalasi Laundry (DAK)	Padang	100%	95%	524.118.503	100%	424.078.997	80,91
<b>II</b>	<b>Program peningkatan pelayanan BLUD</b>				<b>24.469.657.515</b>		<b>22.893.912.526</b>	<b>93,56</b>
1	Pelayanan BLUD	Padang	100%	95%	24.469.657.515	95%	22.893.912.526	93,56
<b>JUMLAH BELANJA</b>					<b>27.352.954.364</b>	<b>99%</b>	<b>25.297.805.296</b>	<b>92,49</b>

## REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TA. 2020

SKPD : RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

NO	URAIAN	LOKASI	TARGET KUALITATIF		ANGGARAN TAHUN 2020	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	
							Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>							
1	GAJI DAN TUNJANGAN PNS	PADANG	100%	95%	15.296.177.451	100%	15.151.038.302	99,05
2	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	PADANG	100%	95%	5.022.550.625	100%	5.019.049.146	99,93
	<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>20.318.728.076</b>		<b>20.170.087.448</b>	<b>99,27</b>

## REALISASI BELANJA APBD TA. 2020

SKPD : RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

NO	URAIAN	LOKASI	TARGET KUALITATIF		ANGGARAN TAHUN 2019	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	
							Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>PADANG</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>20.318.728.076</b>		<b>20.170.087.448</b>	<b>99,27</b>
II	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>PADANG</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>27.352.954.364</b>		<b>25.297.805.296</b>	<b>92,49</b>
	<b>TOTAL BELANJA</b>				<b>47.671.682.440</b>		<b>45.467.892.744</b>	<b>95,38</b>

**PENDAPATAN RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang  
TAHUN 2020**

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET TAHUN 2020	JUMLAH	CAPAIAN
1	<b>PENDAPATAN OPERASIONAL DARI JASA LAYANAN</b>			
A.	INSTALASI GAWAT DARURAT / PICU	40.000.000,00	40.445.639,00	101,11%
B.	INSTALASI RAWAT JALAN	7.581.500.000,00	6.381.039.011	84,17%
C.	INSTALASI RAWAT INAP A	450.000.000,00	433.081.185,00	96,24%
D.	INSTALASI RAWAT INAP B	10.450.000.000,00	11.097.207.114,00	106,19%
E.	INSTALASI NAPZA	250.000.000,00	356.344.600,00	142,54%
J.	INSTALASI FARMASI	2.500.000.000,00	2.820.119.071,00	112,80%
	<b>JUMLAH</b>	<b>21.271.500.000,00</b>	<b>21.128.236.620,00</b>	<b>99,33%</b>
2	<b>PENDAPATAN USAHA</b>			
A.	DIKLAT	400.000.000,00	474.260.000,00	118,57%
B.	KERJASAMA OPERASIONAL	-	-	
C.	KEUANGAN	35.000.000,00	28.981.741,00	82,80%
D.	TATA USAHA	30.000.000,00	30.562.184,00	101,87%
E.	PENERIMAAN LAIN-LAIN	150.000.000,00	146.559.711,00	97,71%
	<b>JUMLAH</b>	<b>615.000.000,00</b>	<b>680.363.636,00</b>	<b>110,63%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>21.886.500.000,00</b>	<b>21.808.600.256,00</b>	<b>99,64%</b>

**PENGUKURAN TARGET KINERJA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

OPD Penanggung Jawab : RS JIWA Prof. HB. SAANIN PADANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pelayanan Kualitas Kesehatan Jiwa Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU)	90%	93.84	104
		AvLOS (IKU)	42 Hari	26 Hari	138
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pasien Non Jiwa Yang Ditangani Spesialis (IKU)	85%	89.07%	105
3	Meningkatkan Kemandirian RS	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (IKU)	Nilai BB (Nilai 76%)	79.15%	104
		Tingkat Kemandirian Keuangan (IKU)	46%	47.96%	104

Program yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja yang ditetapkan:

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/RS.Paru/RS.Mata	Rp 2,883,296,849	Rp 2,403,892,770.00	83.37
2	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Rp 24,469,657,515	Rp 22,893,912,526	93.56

Padang, Januari 2021  
Plt. Direktur  
RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

  
dr. Aklima MPH  
NIP. 19680203 200212 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**



Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71379

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **drg. Ernoviana, M.Kes**

Jabatan : Direktur RS Jiwa Prof.HB.Saanin Provinsi Sumatera Barat

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : **IRWAN PRAYITNO**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

**Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, November 2020

PIHAK KEDUA,

  
**IRWAN PRAYITNO**

PIHAK PERTAMA,



**drg. Ernoviana, M.Kes**  
NIP. 19601118 198701 2 001

## PERJANJIAN KINERJA

OPD  
TAHUN

: RS Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG  
: 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU)	90%
		AvLOS (IKU)	42 Hari
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pasien Non Jiwa Yang Ditangani Spesialis (IKU)	85%
3	Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (IKU)	Nilai BB (76%)
4	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit	Tingkat Kemandirian Keuangan (IKU)	46%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS.Paru/RS.Mata	Rp 2.883.296.849,00	APBD
2	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Rp 24.469.657.515,00	BLUD

Gubernur Sumatera Barat



IRWAN PRAYITNO

Padang, November 2020  
Direktur

RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang



drg. Erioviana, M.Kes  
NIP.196011181987012001

**PENGUKURAN TARGET KINERJA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

OPD Penanggung Jawab : RS Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pelayanan Kualitas Kesehatan Jiwa Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU)	90%	-	-
		AvLOS (IKU)	42 Hari	27 Hari	136
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pasien Non Jiwa Yang Ditangani Spesialis (IKU)	85%	87,52%	103
3	Meningkatkan Kemandirian RS	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (IKU)	Nilai A	79,15%	99
		Tingkat Kemandirian Keuangan (IKU)	46%	49,11%	106,76

Program yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja yang ditetapkan:

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS.Paru/RS.Mata	Rp 2.596.628.503	Rp 728.408.561,00	28,05
2	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Rp 21.886.500.000	Rp 16.605.836.322	75,87

Padang, 08 Oktober 2020

Direktur

RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

  
 drs. Pratiyana, M.Kes  
 NIP. 19601118 198701 2 001

**PENGUKURAN TARGET KINERJA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

OPD Penanggung Jawab : RS Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pelayanan Kualitas Kesehatan Jiwa Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU)	90%	-	-
		AvLOS (IKU)	42 Hari	29 Hari	131
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pasien Non Jiwa Yang Ditangani Spesialis (IKU)	85%	89,04%	105
3	Meningkatkan Kemandirian RS	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (IKU)	Nilai A	N/A	N/A
		Tingkat Kemandirian Keuangan (IKU)	46%	54,83%	119,20

Program yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja yang ditetapkan:

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS.Paru/RS.Mata	Rp 2.596.628.503	Rp 160.105.499,00	6,17
2	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Rp 21.886.500.000	Rp 11.886.712.688	54,31

Padang, Juli 2020

Direktur

RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang



drh. Ernoviana, M.Kes  
NIP. 19601118 198701 2 001

**PENGUKURAN TARGET KINERJA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**


OPD Penanggung Jawab : RS Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pelayanan Kualitas Kesehatan Jiwa Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU)	90%	-	-
		AvLOS (IKU)	42 Hari	28 Hari	133
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pasien Non Jiwa Yang Ditangani Spesialis (IKU)	85%	85.57%	101
3	Meningkatkan Kemandirian RS	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (IKU)	Nilai A	N/A	N/A
		Tingkat Kemandirian Keuangan (IKU)	46%	74.07%	161.02

Program yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja yang ditetapkan:

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/RS.Paru/RS.Mata	Rp 6,058,184,003	-	-
2	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Rp 29,182,000,000	Rp 3,525,833,452	12.08

Padang, April 2020  
Direktur  
RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

  
drg. Ernyiana, M.Kes  
NIP. 14691118 198701 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**



Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71379

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **drg. Ernoviana, M.Kes**

Jabatan : Direktur RS Jiwa Prof.HB.Saanin Provinsi Sumatera Barat

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : **IRWAN PRAYITNO**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

**Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Februari 2020

PIHAK PERTAMA,

  
**drg. Ernoviana, M.Kes**  
NIP. 19601118 198701 2 001

PIHAK KEDUA,  
  
**IRWAN PRAYITNO**

## PERJANJIAN KINERJA

OPD  
TAHUN

: RS Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG  
: 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU)	90%
		AvLOS (IKU)	42 Hari
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Non Jiwa yang Menunjang Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Pasien Non Jiwa Yang Ditangani Spesialis (IKU)	85%
3	Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (IKU)	Nilai A
4	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit	Tingkat Kemandirian Keuangan (IKU)	46%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS.Paru/RS.Mata	Rp 6.058.184.003,00	APBD
2	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Rp 29.182.000.000,00	BLUD

Gubernur Sumatera Barat



IRWAN PRAYITNO

Padang, Februari 2020  
Direktur  
RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang



dr. Ernoviana, M.Kes  
NIP. 19604118 198701 2 001



**Anugerah Keterbukaan Informasi Publik  
Se - Sumatera Barat Tahun 2020**

Kategori : Organisasi Perangkat Daerah

**RSJ. PROF. HB. SAANIN PADANG**

Sebagai Badan Publik

**INFORMATIF**

Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008  
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Padang, 25 November 2020

Komisaris Informasi Sumatera Barat  
Krisna

